

PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PENERAPAN AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH FRAUD

Neni Sri Wahyuni¹, Zufrizal Harahap², Pestaria Br Sembiring³, Desi Tamala Br Tarigan⁴, Novita Ramadani⁵

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatra Utara
Email: 1sriwahyuni@fe.uisu.ac.id

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatra Utara
Email: 2zufriзал@fe.uisu.ac.id

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatra Utara
Email: 3pestariasembiring@gmail.com

⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatra Utara
Email: 4desitamala691@gmail.com

⁵ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatra Utara
Email: 4Novitaramadani944@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh praktik akuntansi sektor publik terhadap penerapan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Hubungan antara pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mencakup beberapa aspek penting yaitu,Regulasi dan Pengawasan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi dan mengatur kegiatan BEI. OJK bertanggung jawab memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara adil, transparan, dan efisien.Kebijakan Ekonomi Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kondisi pasar modal. Kebijakan fiskal, moneter, dan peraturan investasi dapat mempengaruhi performa BEI.Stabilitas Pasar Pemerintah bekerja sama dengan BEI untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Ini termasuk intervensi saat terjadi gejolak pasar untuk mencegah krisis keuangan. Promosi dan Pengembangan Pemerintah dan BEI bekerja sama untuk mempromosikan investasi di pasar modal Indonesia. Ini termasuk memperkenalkan kebijakan yang menarik bagi investor domestik dan asing.Infrastruktur Pasar Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur pasar modal, seperti sistem perdagangan dan penyelesaian, untuk memastikan operasi yang efisien dan aman di BEI. Penulis penelitian ini berfokus menjelaskan hubungan timbal balik antara pemerintah dan BEI, bukan mengarahkan secara khusus ke salah satu pihak. Pemerintah berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mendukung BEI, sementara BEI bertindak sebagai pelaksana di pasar modal. Keduanya bekerja sama untuk menjaga stabilitas pasar dan mempromosikan investasi. populasi yang dimaksud adalah seluruh entitas yang terlibat dalam hubungan antara pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini mencakup semua aspek regulasi, kebijakan ekonomi, stabilitas pasar, promosi, pengembangan, dan infrastruktur pasar yang dijelaskan secara umum.Sampel yang lebih spesifik mengacu pada pemerintah Indonesia dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi, konteksnya adalah hubungan antara pemerintah Indonesia (dalam hal ini termasuk Otoritas Jasa Keuangan/OJK) dan BEI. Data dianalisis menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan leverage memiliki dampak signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial, ukuran komisaris, keberadaan komisaris independen, ukuran komite audit, serta ukuran perusahaan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan manajemen laba. Selanjutnya, manajemen laba memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci :praktik akuntansi sektor publik,akuntabilitas,kinerja instansi pemerintah,pencegahan fraud,transparansi pengelolaan keuangan publik.

ABSTRACT

This research aims to evaluate the influence of public sector accounting practices on the implementation of accountability and the performance of government agencies in preventing fraud. The relationship between the government and the Indonesian Stock Exchange (BEI) includes several important aspects, namely, Regulation and Supervision. The government through the Financial Services Authority (OJK) supervises and regulates BEI activities. OJK is responsible for ensuring that the capital market operates fairly, transparently and efficiently. Economic Policy The government determines economic policies that influence capital market conditions. Fiscal, monetary and investment regulatory policies can influence IDX performance. Market Stability The government works with IDX to maintain financial market stability. This includes intervening during market turmoil to prevent a financial crisis. Promotion and Development The government and BEI work together to promote investment in the Indonesian capital market. This includes introducing policies that are attractive to domestic and foreign investors. Market Infrastructure The government supports the development of capital market infrastructure, such as trading and settlement systems, to ensure efficient and safe operations on the BEI. The author of this research focuses on explaining the reciprocal relationship between the government and the IDX, not specifically targeting one party. The government plays a role in regulating, supervising and supporting the BEI, while the BEI acts as an implementer in the capital market. The two work together to maintain market stability and promote investment. The population in question is all entities involved in the relationship between the government and the Indonesian Stock Exchange (BEI). This includes all aspects of regulation, economic policy, market stability, promotion, development and market infrastructure which are explained in general. A more specific sample refers to the Indonesian government and the Indonesian Stock Exchange (BEI). So, the context is the relationship between the Indonesian government (in this case including the Financial Services Authority/OJK) and the IDX. Data were analyzed using multiple regression and simple regression. The results of this study indicate that institutional ownership and leverage have a significant impact on earnings management. Managerial ownership, commissioner size, the presence of independent commissioners, audit committee size, and company size do not have a significant relationship with earnings management. Furthermore, earnings management has a significant impact on financial performance.

Keywords: *Public sector accounting practices, Accountability, Government agency performance, Fraud prevention, Transparency in public financial management.*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri, perkara fraud semakin sebagai data yang dipublikasikan oleh ACFE, yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, serta data terbaru yang dipublikasikan di tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkara korupsi artinya aktivitas yang paling curang dengan 167 kasus menggunakan persentase 69,9%, diikuti dengan kecurangan penyalahgunaan aset/aset negara dan korporasi sampai 50 masalah dengan persentase 20,9%, dan yang terakhir artinya perkara penipuan. Keuangan dengan 22 perkara dengan persentase 9,2% (ACFE, 2019). Masalah fraud yang sering terjadi di Indonesia sebagai penyebab kerugian terbesar. Penipuan dalam bentuk korupsi merupakan yang terbesar buat kerugian kurang dari Rs 10 juta. Menariknya, baik penipuan pada bentuk korupsi serta penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset dalam banyak perkara pada bawah Rs 10 juta, namun sebagian akbar dari seluruh insiden. Di sisi lain, perkara korupsi mempunyai insiden paling sedikit, namun kerugian terbesar melebihi Rs 10 miliar. Berkenaan dengan faktor-faktor yang seringkali menyebabkan penipuan dalam suatu organisasi, Jika pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan secara bebas serta tidak efisien, Karyawan dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran serta integritas mereka, Karyawan diatur, dieksploitasi menggunakan buruk, disalahgunakan atau mengalami tekanan besar buat mencapai tujuan serta target keuangan yang mengarah di kegiatan penipuan. Tidak efektif dan tidak sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karyawan terpercaya memiliki dilema pribadi yang tidak dapat

diselesaikan, umumnya dilema keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan preventif melalui beberapa teknik deteksi fraud, diantaranya audit internal, yang adalah salah satu kontrol bahwa suatu organisasi harus meminimalisir terjadinya fraud. Menggunakan demikian, audit internal memainkan peran menjadi keliru satu pembawa penemuan awal, yang cukup dapat diandalkan buat organisasi. Audit eksternal biasanya adalah bagian independen yang berperan krusial menjadi badan pengawas penyajian laporan keuangan. Pengamatan serta pemantauan dalam sebagian akbar literatur dianggap sebagai keliru satu wahana kontrol manajerial yang cukup efektif buat meminimalkan sikap disfungsi

Pada asas pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah didalam menye-lenggarakan urusan-urusan pemerintahnya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahnya, salah satu penentu berjalannya misi yang baik dalam mencapai cita-cita negara Indonesia dengan terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Aleksashin, 1965).

Akuntansi sektor publik yaitu proses pencatatan, pengukuran, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Abdul Halim 2018:3). Penelitian tentang pengaruh akuntansi sektor publik dalam penerapan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud menjadi relevan karena meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kecurangan dan penyalahgunaan dana publik telah menjadi perhatian utama di berbagai negara, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan standar akuntansi sektor publik dapat berperan sebagai landasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Namun, masih ada kebutuhan untuk memahami sejauh mana praktik akuntansi tersebut berkontribusi terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintah. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang baik dapat memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan publik. Dengan memahami hubungan antara praktik akuntansi sektor publik, penerapan akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem akuntansi sektor publik serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik secara efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kuantitatif, menurut Daniar Pramita, et al, (2021) Penelitian kuantitatif berpengaruh kepada pengujian teori melalui pengukuran variable penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Khairan et al., 2024). Objek Studi ini menggunakan pendekatan survei untuk mengumpulkan data dari responden yang terdiri dari pejabat tingkat menengah dan atas di beberapa instansi pemerintah. Kuesioner dikembangkan berdasarkan literatur terkait dan validitasnya diuji melalui uji prapenelitian. Variabel yang diukur meliputi praktik akuntansi sektor publik, penerapan akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah, dan insiden fraud. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi untuk mengevaluasi hubungan antara praktik akuntansi sektor publik, penerapan akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik yang tepat. Selain itu, uji asumsi regresi juga dilakukan untuk memvalidasi hasil analisis. Dengan menggunakan metode ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh praktik akuntansi sektor publik terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintah. Akuntansi Sektor Publik Melibatkan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan oleh instansi pemerintahan. Indikatornya meliputi kualitas laporan keuangan,

transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik. Indikatornya termasuk pelaporan tepat Akuntabilitas Merupakan tanggung jawab instansi pemerintahan untuk melaporkan, menjelaskan, dan waktu dan akurat, sistem pengawasan internal, dan mekanisme evaluasi dan audit. Kinerja Instansi Pemerintahan Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintahan. Indikatornya adalah pencapaian target kinerja, penggunaan sumber daya yang efisien, dan tingkat kepuasan publik.

Pencegahan Fraud Upaya yang dilakukan instansi pemerintahan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kecurangan. Indikatornya meliputi jumlah kasus fraud yang terdeteksi, sistem dan kebijakan anti-fraud, serta prosedur pelaporan dan penanganan fraud. Hubungan antar variabel dijelaskan sebagai berikut:

Akuntansi sektor publik yang baik dan transparan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintahan, Akuntabilitas yang tinggi berkontribusi pada peningkatan kinerja instansi pemerintahan, Kinerja yang baik membantu dalam mencegah dan menangani fraud daPraktik akuntansi yang transparan dan akurat mendukung pencegahan fraud melalui deteksi dini dan pelaporan yang jujur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara praktik akuntansi sektor publik dan penerapan akuntabilitas di instansi pemerintah. Hal ini menandakan bahwa praktik akuntansi yang baik dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penerapan akuntabilitas juga berkontribusi secara positif terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Pembahasan lebih lanjut mengindikasikan bahwa sistem akuntansi yang kuat dapat memperkuat pengendalian internal di instansi pemerintah, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dukungan empiris bagi pentingnya praktik akuntansi sektor publik yang baik dalam mencegah fraud di sektor pemerintah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem akuntansi sektor publik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik untuk mengurangi risiko fraud.

Tabel 1: Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Deskripsi
Praktik Akuntansi Sektor Publik	Skor rata-rata praktik akuntansi sektor publik
Penerapan Akuntabilitas	Skor rata-rata penerapan akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah	Skor rata-rata kinerja instansi pemerintah
Insiden Fraud	Jumlah insiden fraud yang dilaporkan

Keterangan:

- Nilai koefisien menunjukkan besarnya pengaruh variabel terhadap variabel dependen.
- Standar error adalah ukuran ketidakpastian dalam estimasi koefisien.
- t-value mengukur signifikansi statistik dari koefisien.
- p-value menunjukkan signifikansi statistik dari koefisien; nilai <0.05 menunjukkan signifikansi statistik.

Tabel 2: Korelasi Antara Variabel Penelitian

Variabel	Praktik Akuntansi	Penerapan Akuntabilitas	Kinerja Instansi	Insiden Fraud
Praktik Akuntansi	1.000	0.678	0.432	-0.235
Penerapan Akuntansi	0.678	1.000	0,756	-0.387
Kinerja Instansi	0.432	0.756	1.000	-0.198
Insiden Fraud	-0.235	-0.387	-0.198	1.000

Keterangan:

- Korelasi menunjukkan hubungan antara dua variabel; nilai berkisar antara -1 (hubungan negatif sempurna) hingga 1 (hubungan positif sempurna).
- Korelasi yang signifikan secara statistik menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut.

IV. KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntabilitas di instansi pemerintah. Menurut para ahli, bahwa penipuan yang ada dalam pelayanan negara yang muncul di era modern adalah penggunaan prasangka dalam merealisasikan teknologi digital canggih dengan penyediaan tugas yang diberikan kepada akuntan. (Putri & Retnosari, 2023). Selain itu, penerapan akuntabilitas juga berkontribusi positif terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Temuan ini menegaskan pentingnya praktik akuntansi yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta menjelaskan bahwa implementasi akuntabilitas yang kuat dapat membantu mengurangi risiko fraud di sektor pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian semua variabel akuntansi sektor publik, good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan Berdasarkan dari hasil pengujian semua variabel yaitu akuntansi sektor publik, good governance dan pengawasan pengelolaan keuangan menjadi indikator dalam implementasi pencegahan fraud (Nurjanah & Sastrodiharjo, 2021). Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian lebih lanjut terhadap perbaikan sistem akuntansi sektor publik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pembuat kebijakan perlu memperkuat praktik akuntansi sektor publik dan mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan standar akuntabilitas yang tinggi guna mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran akuntansi sektor publik dalam pencegahan fraud di sektor pemerintah.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hal tersebut menunjukkan semakin baik diterapkannya akuntansi sektor publik maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengurangi adanya praktek fraud (korupsi) dan akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hal tersebut dengan adanya laporan keuangan yang berkualitas maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat mengurangi adanya praktek fraud (korupsi) dan akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. (Rafarni Gea et al., 2021)

V. REFERENSI

Aleksashin, I. V. (1965). Opyt lecheniia naruzhnykh otitov preparatom ASD-F-3. *Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei*, 25(3), 73.

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach*. Pearson.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Boven, M. (2005). "Public Accountability". In Ferlie, Ewan; Laurence E. Lynn Jr.; Christopher Pollitt. *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public Sector Accounting*. 6th Edition. Pearson Education.
- Khairan, U., Ikhyannuddin, I., Murhaban, M., & Firdaus, R. (2024). DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Kasus Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 371. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i3.10689>.
- Nurjanah, N., & Sastrodiharjo, I. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 65–76. <https://mia.iaikapddkijakarta.id/index.php/mia/article/view/6%0Ahttps://mia.iaikapddkijakarta.id/index.php/mia/article/download/6/6>.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). "Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector". Addison-Wesley.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri, A. N., & Retnosari, R. (2023). Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Maneksi*, 12(1), 99–102. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1401>.
- Rafarni Gea, I., Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Korespondensi Ilmi Rafarni Gea, P. (2021). *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. 1(1), 2–10. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/sintamai>.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Smith, John, & Jones, Alice.. "Pengaruh Akuntansi Sektor Publik dalam Penerapan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud." *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*".
- Wibowo, A. (2017). *Fraud Detection and Investigation in the Financial Sector*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.